

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)
DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) TERHADAP
PEROLEHAN OPINI AUDIT BPK TAHUN 2022 DI KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

JOSEPH EUFRASIAN TO DA SILVA

NPP. 30.1139

Asdaf Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program Studi Keuangan Publik

Email: vantodasilva@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Budi Margono, S.Pd, M.Si

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): The application of SIPD in all Regional Governments from planning to evaluation as well as the application of new rules in financial reports and Sikka Regency is able to maintain the acquisition of opinions on the implementation of new rules in WTP in 2022. **Purpose:** This study aims to find out and analyze the effect of the implementation of SIPD which has just been implemented throughout Indonesia starting in 2022 and the quality of LKPD with the latest regulation on the 2022 BPK Audit Opinion Acquisition in Sikka Regency. **Method:** This research method is descriptive quantitative. Data collection techniques using a questionnaire. Respondents in this study amounted to 68 people with purposive random sampling technique. Data analysis model using multiple linear regression. The data obtained was processed and analyzed using SPSS Version 20 statistical data processing software. **Results/Findings:** The results of the study show that the application of SIPD has a positive and significant effect on the BPK's Audit Opinion Obtaining. The quality of LKPD has a positive and significant effect on the Obtaining of BPK's Audit Opinion. The application of SIPD and LKPD Quality together influence the Obtaining of BPK's Audit Opinion. **Conclusion:** The Implementation of Local Government Information Systems (SIPD) and Quality of Local Government Financial Reports (LKPD) have a positive and significant effect on BPK Audit Opinion Obtaining. The adjusted R² value of 0.628 means that the dependent variable can be explained by the independent variable of 62.8% or it can be said that 62.8% of the change in the BPK Opinion Gathering variable can be explained by the SIPD Implementation and Quality of LKPD variables.

Keywords: BPK Opinion, LKPD, SIPD

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penerapan SIPD di seluruh Pemerintah Daerah mulai dari perencanaan hingga evaluasi serta penerapan aturan baru dalam laporan keuangan dan Kabupaten Sikka mampu mempertahankan perolehan opini penerapan aturan baru dalam WTP pada Tahun 2022. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh dari Penerapan SIPD yang baru saja diterapkan diseluruh Indonesia mulai Tahun 2022 dan Kualitas LKPD dengan adanya regulasi terbaru terhadap Perolehan Opini Audit BPK Tahun 2022 di Kabupaten Sikka. **Metode:** Metode penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Responden dalam penelitian ini berjumlah 68 orang dengan teknik pengambilan sampel *Purposive Random Sampling*. Model analisis data dengan menggunakan regresi linear berganda. Data yang didapatkan diolah dan dianalisis dengan menggunakan *Software* pengolah data statistik SPSS Versi 20. **Hasil/Temuan:** Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penerapan SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perolehan Opini Audit BPK. Kualitas LKPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perolehan Opini Audit BPK. Penerapan SIPD dan Kualitas LKPD secara bersama-sama berpengaruh terhadap Perolehan Opini Audit BPK. **Kesimpulan:** Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perolehan Opini Audit BPK. Nilai adjusted R² sebesar 0,628 mempunyai arti bahwa variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar 62,8% atau dapat dikatakan 62,8% perubahan atas variabel Perolehan Opini BPK dapat dijelaskan oleh variabel Penerapan SIPD dan Kualitas dari LKPD.

Kata kunci: LKPD, Opini BPK, SIPD

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, dan mengembangkan demokrasi lokal. Terdapat empat aspek dalam otonomi daerah. Yaitu aspek fisik kewilayahan, aspek legal konstitusional, aspek penduduk, dan aspek pemerintahan yang baik. Adanya otonomi daerah akan membuat pemerintah daerah lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, partisipatif, kreatif dan inovatif. Pendelegasian wewenang untuk mengatur dan mengendalikan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah, termasuk wewenang untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dituangkan dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah untuk pengelolaan keuangan yang akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi mutu dari laporan keuangan pada suatu pemerintahan daerah yaitu kualitas dari manusia itu sendiri, penggunaan sistem akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan kontrol yang dilakukan dari dalam sebuah organisasi. Menurut Moenek dan Suwanda, Informasi Laporan keuangan yang berkualitas wajib memenuhi beberapa syarat yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Moenek 2019). Laporan keuangan pemerintah dirancang dengan maksud sebagai alat untuk memberikan informasi dan akuntabilitas atas dana yang diterima dan dana yang digunakan.

Untuk memudahkan dalam mempublikasikan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah maupun informasi tentang pemerintahan daerah kepada publik, maka Kementerian Dalam Negeri mengatur sebuah sistem yang terhubung dan terintegrasi dalam satu sistem yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang telah selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan kini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem ini merupakan penataan kembali mengenai informasi pembangunan daerah, keuangan daerah, dan Pemerintahan Daerah lainnya yang terintegrasi kedalam satu sistem. Pemerintah Kabupaten Sikka merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penerapan aplikasi SIPD berbentuk web ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pemerintah khususnya Kabupaten Sikka, namun dalam menjalankan program ini tidaklah mudah harus memerlukan kerjasama dan kerja keras dari setiap instansi yang terlibat. Kontrol pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Kontrol yang dilakukan oleh BPK terdiri atas Pemeriksaan Keuangan, Kinerja, dan dengan tujuan tertentu. BPK diberi otoritas untuk kemudahan mendapat data, dan penjelasan dari pemerintah daerah.

Hasil evaluasi pemeriksaan dituangkan dalam pernyataan mengenai tingkat kewajaran informasi yang dikeluarkan oleh BPK dengan memperhitungkan informasi yang didapatkan dari pemerintah, bank sentral dan publik yang disebut Opini BPK. Pemberian opini ini, memperhatikan beberapa syarat seperti keselarasan laporan keuangan dengan standar yang telah disepakati Oleh pemerintah, kecukupan dalam proses pengungkapan, ketaatan dengan peraturan yang mengaturnya, dan yang terakhir adalah tingkat keefektifan dari pengendalian yang dilakukan di lingkungan pemerintahan intern itu sendiri.

Kabupaten Sikka secara konsisten dari 2017 hingga 2021 mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian oleh BPK. Dengan menggunakan struktur dan peraturan yang lama Pemerintah Kabupaten Sikka di anggap telah melaksanakan roda pemerintahan secara akuntabel sesuai standar

yang berlaku. Prestasi yang didapatkan Pemerintah Kabupaten Sikka ini merupakan hal yang wajib dipertahankan dan terus ditingkatkan dalam rangka mempertahankan manajemen keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitu juga laporan keuangan daerah yang berkualitas dan selaras dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh BPK tentu juga akan mempengaruhi terhadap pemberian Opini BPK.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks opini audit BPK dan penerapan SIPD. Penelitian Zilfi dan Ahli, 2019 berjudul Pengaruh Opini Audit terhadap Opini BPK pada Lembaga Tahun 2015-2017, menemukan bahwa opini audit sebelumnya berpengaruh positif terhadap opini audit Lembaga tahun 2015-2017 (Zifi and Ali 2019). Penelitian Andi Nur Asiah dengan judul Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi, dan SPIP terhadap Nilai Pelaporan Keuangan di Kabupaten Gowa menemukan bahwa Kualitas SDM, pemanfaatan teknologi Informasi, SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai pelaporan keuangan (Nur 2019). Penelitian Balqis dan Fadly menemukan bahwa Penerapan SIPD sudah efektif, mudah dan cepat, namun masih butuh pengawasan (Balqis and Fadly 2021).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pengaruh penerapan SIPD serta kualitas LKPD terhadap perolehan opini audit BPK, metodenya yang digunakan menggunakan kuantitatif *explanatory* juga berbeda dengan penelitian Zilfi, Andi Nur, dan Balqis, dkk. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Jagiyanto (2020) tentang teori kualitas informasi dan teori kualitas LKPD menurut Moenek dan Suwanda (2019).

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh penerapan SIPD dan kualitas LKPD terhadap perolehan opini audit BPK Tahun 2022 di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan kuantitatif *explanatory*. Metode ini digunakan dengan tujuan mengkaji pada populasi atau sampel yang telah ditentukan, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, menganalisis suatu hubungan dari variabel (independent) mempengaruhi variabel lainnya (dependent) dengan menggunakan *software* pengolah data SPSS (Sugiyono, 2017). Penulis mengumpulkan data melalui kuesioner meliputi jawaban responden. Sehingga sumber data yang diperoleh merupakan sumber asli, tanpa melalui perantara atau biasa disebut dengan data primer.

Adapun analisisnya menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif diterapkan dengan tujuan untuk memprediksi data dengan metode mendeskripsikan sebuah data yang sudah dikumpulkan dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan secara umum atau generalisasi. Selain itu, penulis juga menggunakan statistik inferensial merupakan teknik statistik untuk memprediksikan data dan hasilnya akan diberlakukan untuk populasi. Variabel pada penelitian ini terdiri dari dua variabel X dan 1 variabel Y serta adanya 68 orang responden dari masing-masing OPD di Lingkungan Pemda Kabupaten Sikka yang akan menjawab masing- 48 masing sebanyak 43 pertanyaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pengaruh dengan melalui hasil uji hipotesis. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

Tabel 4. 12
Hasil Uji T (t-test)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	61,829	3,282		18,838	,000
1 Penerapan SIPD	,415	,057	,540	7,239	,000
Kualitas LKPD	,496	,066	,564	7,558	,000

a. Dependent Variable: Perolehan Opini Audit BPK
Sumber : Hasil Penelitian, 2023 (diolah)

Dari tabel 4.12 Diatas hasil uji t (t-test) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel Penerapan SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perolehan Opini Audit BPK pada Kabupaten Sikka, dimana nilai thitung (7,239) > ttabel (1,997) dan sig pada 0,000 < 0,05. Sehingga, H01 ditolak dan Ha1 diterima, yang artinya jika terjadi kenaikan 1 poin dalam penerapan SIPD maka kemungkinan mendapatkan opini audit BPK dengan Predikat WTP akan bertambah sebanyak 0,415 poin. Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta (Constant) 61,829 3,282 18,838 ,000 1 Penerapan ,415 ,057 ,540 7,239 ,000 Kualitas LKPD ,496 ,066 ,564 7,558 ,000 81 Semakin baik tanggapan responden atas penerapan SIPD maka akan semakin besar kemungkinan Kabupaten Sikka mendapatkan Opini Audit BPK dengan Predikat WTP atau Predikat Terbaik dalam pengelolaan keuangan.

2. Variabel Kualitas LKPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap perolehan opini audit BPK di Kabupaten Sikka, dimana nilai thitung (7,558) > ttabel (1,997) dan sig pada 0,000 < 0,05 Sehingga, H02 ditolak dan Ha2 diterima, yang artinya jika terjadi peningkatan sebesar 1 poin atas Kualitas LKPD kemungkinan mendapatkan opini audit BPK dengan Predikat WTP bertambah sebesar 0,496 poin.

Semakin baik tanggapan responden atas Kualitas LKPD maka akan semakin besar kemungkinan Kabupaten Sikka mendapatkan Opini Audit BPK dengan Predikat WTP atau Predikat Terbaik dalam pengelolaan keuangan. Pengaruh secara simultan dapat disimpulkan dari hasil uji F, dimana pada penelitian ini nilai Fhitung > nilai Ftabel pada tingkat signifikansi dibawah 0,05 (Ho ditolak dan Ha diterima). Oleh karena itu, Penerapan SIPD dan Kualitas LKPD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Perolehan Opini Audit BPK di Kabupaten Sikka.

Pengaruh secara parsial dapat dilihat dari hasil uji t, dimana nilai thitung > nilai ttabel pada tingkat sig dibawah 0,05 (Ho ditolak dan Ha diterima). Oleh karena itu, Penerapan SIPD dan Kualitas LKPD secara 82 parsial berpengaruh signifikan terhadap Perolehan Opini Audit BPK di Kabupaten Sikka. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Penerapan SIPD dan Kualitas LKPD intern secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Perolehan Opini Audit BPK di Kabupaten Sikka.

3.1. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan SIPD berpengaruh terhadap Perolehan Opini Audit BPK di Kabupaten Sikka dengan tingkat sig sebesar $0,00 < \text{dari } \alpha = 0,05$ dan koefisien regresi 0,415. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial penerapan SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perolehan Opini Audit BPK yang memiliki arti bahwa jika penerapan SIPD dimanfaatkan secara maksimal maka kemungkinan pemerintah daerah memperoleh Opini WTP akan semakin besar. Oleh karena itu, Ho1 ditolak dan Ha1 diterima, hal ini berarti jika terjadi peningkatan dalam penerapan SIPD sebesar 1 poin maka kemungkinan mendapatkan opini audit BPK dengan Predikat WTP sebesar 0,415.

Hal ini sejalan dan sekaligus menggambarkan dengan lebih jelas dari penelitian yang dilakukan oleh Rante (2019) yang menyatakan bahwa penggunaan program aplikasi komputer baik itu SIMDA, SIPKD, dan SIPD 83 yang dipayungi dengan peraturan perundang-undangan yang kemungkinan akan menghambat atau justru akan membantu pemerintah daerah dalam memperoleh opini WTP. Penerapan SIPD ini diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang SIPD untuk memenuhi kewajiban pada pasal 391-395 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana pemerintah daerah diwajibkan untuk menyediakan informasi baik mengenai pembangunan, keuangan, maupun informasi lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi ini digunakan sebagai alat atau media untuk memudahkan manusia salah satunya dalam pengelolaan keuangan yang nantinya diharapkan akan menjadikan pengelolaan keuangan daerah yang akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

Informasi yang tepat waktu merupakan bagian dari nilai-nilai informasi menurut Jagiyanto (2020). Dalam hal pengelolaan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi ini sangat membantu dan mempercepat proses pengolahan data transaksi dan proses penyusunan laporan keuangan sehingga data yang dihasilkan dapat tepat waktu, akurat saat diperiksa oleh BPK maupun diinformasikan kepada masyarakat. Bagi pemerintah daerah yang selalu melaksanakan pengelolaan APBD dimana transaksi dari tahun ketahunnya harus selalu menunjukkan peningkatan dan semakin kompleks.

Teknologi informasi yang kini sudah sangat maju perkembangannya mulai dari komputer, internet, dan komunikasi dalam mengelola keuangan daerah dan segala kegiatan yang ada di pemerintah daerah. Dari teori sistem informasi pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting, untuk itu pemerintah sangat memerlukan sistem yang terintegrasi yang dapat membantu pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahannya termasuk didalamnya pengelolaan keuangan daerah dengan lebih komprehensif yang terdiri dari informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Dalam hal ini, tersusun satu sistem terintegrasi oleh kementerian dalam negeri yaitu SIPD.

3.2 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Kualitas LKPD berpengaruh terhadap Perolehan Opini Audit BPK di Kabupaten Sikka dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$ dan koefisien regresi 0,496. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Kualitas LKPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perolehan Opini Audit BPK. Oleh karena itu, H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini berarti jika terjadi peningkatan Kualitas LKPD sebesar 1 poin maka kemungkinan mendapatkan opini audit BPK dengan Predikat WTP sebesar 0,496. Hal ini sejalan dengan penelitian Rufaedah (2019) dimana dijelaskan berbagai macam faktor yang dapat menghambat diperolehnya opini WTP salah satunya adalah kualitas dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan sendiri memiliki tujuan untuk memenuhi nilai akuntabilitas dan nantinya ditujukan untuk pengambilan sebuah keputusan baik keputusan dalam hak ekonomi, sosial maupun keputusan politik. Laporan keuangan selalu memberikan Feedback walaupun tidak seluruhnya dapat digunakan, namun sebagian besar mampu digunakan untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk kedepannya. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara administrasi. Oleh karena itu, laporan keuangan secara fisik merupakan bagian dari kegiatan pengadministrasian yang diwujudkan dalam bentuk laporan yang nantinya akan diperiksa dan diberikan opini serta evaluasi dari BPK.

3.3 Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Hasil pengujian dugaan sementara antara dua variabel X terhadap satu Variabel Y pada penelitian ini berbunyi bahwa semua variabel independen yang terdiri dari Penerapan SIPD dan Kualitas LKPD secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen yakni Perolehan Opini Audit BPK, dengan dilakukannya uji F menghasilkan nilai $F_{hitung} (7,453) > F_{tabel} (3,15)$ dan nilai Signifikansi $0,000 < 0,05$ (H_0 ditolak dan H_a diterima). Hasil koefisien determinasi (R^2) adalah 0,639 yang menunjukkan adanya hubungan positif antara X_1 dan X_2 secara simultan terhadap Y dengan nilai sebesar 63,9%. Nilai adjusted R^2 sebesar 0,628 berarti variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar 62,8% atau dapat dikatakan 62,8% perubahan atas variabel Perolehan Opini BPK dapat dijelaskan oleh variabel Penerapan SIPD dan Kualitas dari LKPD sedangkan sisanya 37,2% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dilakukan dalam penelitian ini.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penting yang ditemukan peneliti adalah penerapan SIPD dan kualitas dari LKPD sangat berpengaruh terhadap opini BPK sebesar 62,8%, maka hasil penerapan SIPD yang dijalankan dengan tepat akan membuat opini WTP semakin baik. Pemerintah Kabupaten Sikka berhasil mendorong BPK dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan opini terbaik yang diberikan. Opini inilah yang memacu pemerintah dalam memperbaiki setiap laporan keuangan secara seksama dan akuntabel.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor yang dapat menghambat diperolehnya opini WTP salah satunya adalah kualitas dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Pengaruh Penerapan SIPD dan Kualitas LKPD terhadap perolehan Opini Audit BPK Tahun 2022 di Kabupaten Sikka, adalah sebagai berikut :

- a. Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perolehan Opini Audit BPK. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dan koefisien regresi 0,415. Serta nilai thitung (7,239) > ttabel (1,997).
- b. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perolehan Opini Audit BPK. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dan koefisien regresi 0,496. Serta nilai thitung (7,558) > ttabel (1,997).
- c. Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perolehan Opini Audit BPK. Nilai adjusted R² sebesar 0,628 mempunyai arti bahwa variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar 62,8% atau dapat dikatakan 62,8% perubahan atas variabel Perolehan Opini BPK dapat dijelaskan oleh variabel Penerapan SIPD dan Kualitas dari LKPD sedangkan sisanya 37,2% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dilakukan dalam penelitian ini.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perwakilan masing-masing perangkat daerah di lingkup Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kualitas LKPD dan perolehan opini audit BPK untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sikka yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk meneliti terkait kualitas LKPD dan perolehan opini audit BPK, serta

seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah untuk perbaikan dikemudian hari.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, Graha Ilmu. In *Yogyakarta, edisi pertama, hal* (Vol. 35). Graha Ilmu.
- Agus, P., & Riyanto. (2012). *Manajemen Aset Daerah : Sistem Dan Prosedur Barang Milik Daerah*. Indie Book Corner.
- Balqis, Nadya, and Zuhrizal Fadhly. 2021. “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Di Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (Distranaker) Kabupaten Aceh Barat.” *Jurnal Public Policy* 7(2):117. doi: 10.35308/jpp.v7i2.4246.
- Moenek, R. dan D. Suwanda. 2019. *Mempertahankan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda*. edited by P. PPM. Jakarta.
- Nur, Andi. 2019. “PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP NILAI PELAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus Kantor SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Di Kabupaten Gowa).” *Progress in Retinal and Eye Research* 561(3):S2–3.
- Zifi, Meliza Putriyanti;, and Fifitri Ali. 2019. “Pengaruh Opini Audit Sebelumnya Terhadap Opini BPK Pada Kementerian / Lembaga Tahun 2015-2017.” *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis* 12(2):39–46.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- <https://accounting.binus.ac.id/2021/11/19/akuntabilitas-laporan-keuangan-dalam-akuntansi-pemerintahan/>
- <https://money.kompas.com/read/2020/02/14/163614026/ini-4-indikator-penentu-opini-wtp-dari-bpk>